

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) SUAMI TERHADAP ISTRI DAN ANAK**

LILAH BIDJA / D 101 09 664

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana penerapan hokum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Rumah tangga dalam perkara dengan putusan No.572/PID.B/2008/PN.PL¹. Tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian studi kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan(Field Research) dengan tipe penelitian deskriptif,yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus putusan No. 572/PID. B/2008/PN. PL.Ini yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa,dan adanya barang bukti, yakni terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair Pasal 44ayat(1)UU No.23 Tahun 2004, dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, di mana dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primair yakni Pasal 44 ayat(1)UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,majelis hakim mendapatkan keyakinannya pada penilaian terhadap proses sidang, yaitu penilaian terhadap alat-alat bukti dan keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan tindak pidana kekerasan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat(1)UU No.23 Tahun 2004.²

Kata Kunci : Tindak Pidana; Tindak Kekerasan;Rumah Tangga

¹Soeroso Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Yuridis-Viktimologi*, Surabaya, 2010, hlm. 18

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Tahun 2011, hlm. 35

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di Indonesia tertuang pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Dalam kegiatannya sehari-hari seorang perempuan, sebagai istri atau sebagai ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk didalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan bersama.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan (istri) dan anak yang harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.³

Semua pihak menyetujui peranan anak yaitu anak adalah harapan masa depan. Namun, seringkali tidak disadari bahwa anak juga memiliki eksistensi. Eksistensi anak sebagai anak, sebagai manusia yang

merupakan bagian dari totalitas kehidupan dan kemanusiaan. Bukankah pada diri setiap anak (semenjak kelahirannya bahkan semenjak menjadi janin dalam rahim ibu) melekat hak-hak dasar yang tidak bisa diabaikan. Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya.⁴

Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa, mereka rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil sehingga fase anak selalu selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.⁵

Oleh karena itu keterkaitan dengan jiwa-jiwa yang mengalami kekerasan akan berdampak pada terhadap perilaku individu korban dan seharusnya terdakwa dihukum sesuai tingkat pelanggaran melawan hukum dalam kitab Undang hukum pidana yang berlaku, maka hal ini diberikan keputusan berdasarkan perilaku yang menyimpang dalam pengadilan pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim.⁶

Putusan majelis hakim perkara No. 572/PID.B/2008/PN.PL.

Adapun focus permasalahan dalam putusan menyangkut pembuktian dan penerapan hukum materil, analisa kasus ini didasarkan pada berkas dakwaan, surat tuntutan, surat putusan, dan surat pendukung lainnya. Kasus ini bermula pada tanggal 12 Juli 2008 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa NOF bertempat di dalam angkot di jalan Gatot Palu sampai jalan Trans Sulawesi Kayumalue dan di rumah saksi MEF di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Tawaeli Kecamatan Palu Utara Kota Palu, saksi korban SIA naik angkutan menuju tempat kerja, setelah beberapa saat berjalan saksi baru mengetahui

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Pers Indonesia Jakarta, 2011, hlm. 27.

⁴*Op.cit*, hlm. 29

⁵*Ibid*, hlm.37

⁶Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 44

bahwa terdakwa NOF bersama orang tua saksi SIA. Terdakwa NOF marah dan membentak saksi SIA karena merasa jawaban saksi SIA sangat kasar dan menahan saksi SIA agar tidak pergi lalu terdakwa NOF mendorong ke dinding mobil dan menampar berulang-ulang saksi SIA. Selanjutnya terdakwa NOF membawa saksi SIA ke rumah orang tua di tawaeli dan sesampai di sana terdakwa menyeret saksi SIA masuk ke dalam rumah kemudian di dalam kamar terdakwa membuka celana JEANS dan celana dalam saksi SIA lalu menginjak paha saksi SIA selanjutnya memukul dan menampar dengan tangan dan mencekik leher saksi SIA yang menyebabkan luka dan rasa sakit sebagaimana hasil visum repertum dari rumah sakit bayangkara N0. Pol. VER/260/VII/2008/RSBY tanggal 12 Juli 2008 perbuatan keluarga tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana primer dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang N0.23 tahun 2004 atau subsidi pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dalam proses pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut berkesimpulan bahwa terdakwa NOF bersalah dan memohon kepada majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :⁷

1. Menyatakan terdakwa NOF secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat 1 UU. N0. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NOF selama 10 bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa NOF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (rupiah)

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan atas diri terdakwa adalah sebagai berikut
Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Bahwa “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa NOF adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal dan pikirannya sehingga dapat bertanggung jawab didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenaran terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Unsur kedua: “ Melakukan kekerasan fisik”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak, rasa sakit atau luka, Menimbang bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, maka akan dibahas beberapa masalah yang dianggap relevan dengan judul Skripsi. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara dengan putusan No.572/PID.B/2008/PN.PL.
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

⁷Ledeng Marpaung, *Asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 87

pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara dengan putusan No. 572/PID.B/2008/PN.PL.

II. PEMBAHASAN

A. Konsepsi Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1984 telah mendefinisikan HAM secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia, dimanapun ia berada, menghormati kemanusiaan semua orang. Paragraf pertama artikel 2 deklarasi tersebut menyatakan, bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁸ Dengan keberadaan artikel 2 Deklarasi tersebut, maka segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic Violence*), terutama terhadap wanita dan anak, dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang yang tidak seharusnya terjadi, karena tindakan demikian jelas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Di dalam suatu Negara bisa saja ada ketentuan tentang persamaan hak dengan tidak memandang perbedaan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata tidaklah selalu berarti demikian. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, misalnya menentukan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Demikian juga ketentuan pasal 3 ayat (3) undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan ketentuan yang sebangun dengan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, di mana di dalamnya telah dinyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Istilah kekerasan (*violence*) seperti di katakana oleh Stephen Jones pada dasarnya

merupakan konsep makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat, waktu, dan konteksnya. Dengan demikian istilah kekerasan merupakan istilah yang memiliki ambiguitas. Sukar dicari pengertian yang pasti dan dapat diberlakukan kapan saja serta di mana saja.

Semula, banyak pihak memandang kekerasan sebagai istilah yang cenderung merujuk pada penggunaan kekuatan fisik (*physical injury*), dalam perkembangannya, kekerasan tidak hanya dibatasi pada penggunaan kekuatan fisik (*physical force*) dan timbulnya perlakuan fisik (*physical injury*) saja, namun juga meliputi semua perbuatan (*physical injury*) yang membawa akibat kerugian fisik maupun psikis (*physical injury and psychological harm*). Perkembangan seperti ini terlihat dari pandangan kaum feminis tentang arti kekerasan.

Dalam rencana aksi yang dihasilkan oleh konferensi dunia IV tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995 telah ditetapkan, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realita social kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini.

Kekerasan domestic (yang sering disebut KDRT) apapun bentuknya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hukum tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. “Bahwa hak asasi perempuan adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang sifatnya universal”. Sehingga komitmen untuk melindungi perempuan dan anak merupakan bagian dari perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia.⁹

⁸Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga, 2009,

⁹Ibid, hlm. 69

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kekerasan domestic mula dari pendampingan kepada korban, mendirikan pusat-pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan dan mengadakan berbagai kekuatan dengan tujuan mengkampanyekan anti kekerasan domestik:

1. Aspek Regulasi

Ada banyak regulasi/peraturan yang dibuat untuk mengurangi kekerasan domestic baik dengan meratifikasi sebagai deklarasi untuk konvensi internasional terkait perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang tersebut menjadi sebuah pijakan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan khususnya oleh Negara dalam konteks menghapuskan diskriminasi termasuk kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah juga mengeluarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang mempunyai tujuan mengurangi segala bentuk kekerasan domestic. Undang-undang tersebut dibuat sebagai landasan Hukum bagi penegak Hukum sekaligus payung atas kerja-kerja atau upaya yang dilakukan dalam mengurangi kekerasan domestic di Indonesia.

2. Pendirian Pusat Layanan Bagi Korban Kekerasan

Sejauh ini pemerintah dan masyarakat terus berupaya menangani, mengurangi dan menghapus KDRT secara bertahap. Tidak dapat disangkal bahwa upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil, antara lain adanya kesadaran Hukum dimana para korban KDRT mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Padahal, sebelumnya para korban menganggap hal itu tabu dan merupakan urusan atau keluarga. Dengan adanya keberanian korban melaporkan kekerasan yang dialami, para pelaku telah mendapat sanksi pidana sebagai hukum atas perbuatannya.

Pengadaan layanan bagi korban kekerasan saat ini juga sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak dan diselenggarakan hampir semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Adanya layanan ini biasanya memberikan pelayanan baik konseling, pendampingan, termasuk didalamnya pendampingan hukum bagi korban.¹⁰

Pendirian pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan tersebut dilakukan dan dikelola berbagai pihak seperti NGO (lembaga non pemerintah) dengan mendirikan berbagai bantuan seperti lembaga bantuan Hukum khusus menangani kasus kekerasan domestic, dengan pendirian semacam WCC (Women Crisis Center). Dari pihak pemerintah misalnya, dengan menyediakan lembaga/tim khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan di masing-masing pemerintah daerah. Seperti dalam kepolisian juga mendirikan satu Ruang pelayanan khusus (RPK) yang ditujukan untuk melayani dan menangani korban kekerasan domestic, atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus demi kerahasiaan korban, pendampingan, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani. Bicara tentang hak disatu pihak akan selalu terkait dengan kewajiban di pihak lainnya. Persoalan yang dikemukakan adalah pihak mana yang sebenarnya berkewajiban menjamin terpenuhi hak-hak korban? Bila yang dimaksud pemerintah, mengapa dalam rangka pemenuhan hak-hak korban, rumusan pasalnya mempengaruhi kata "*berhak mendapatkan*" yang cenderung lebih bermakna relative? Mengapa tidak dipertegas dengan menggunakan

¹⁰Ibid, hlm. 77

kata “wajib memberikan” saja bagi pihak-pihak yang terkait ?

B. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap istri melupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatkan tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum keluarnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Hukum positif dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan suami terhadap istri. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan isteri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para suami ke polisi. Selain itu, isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga/keluarga dapat juga dapat menggunakan instrument Hukum lain, misalnya Hukum perkawinan.¹¹

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrument Hukum yang dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya, yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana merupakan Hukum public yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh dilakukan oleh alat-alat Negara dalam rangka menentukan dan pelaksanaan pidana.

Tujuan Hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari system penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku.

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihipunkan sebagai berikut:

- a. Pembalasan (revenge)
- b. Penghapusan dosa (expiation)
- c. Menjerahkan (deterrent)
- d. Perlindungan terhadap umum (protection of public)
- e. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal)

Di kalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah tujuan pidana ini, salah satu misalnya Baharuddin Lopa yang mengatakan “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar di patuhi oleh masyarakat. Rakyat harus di tingkatan kecintaannya terhadap Hukum sekaligus mematuhi Hukum itu sendiri .

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri,

¹¹UU. N0.23 Tahun 2004, 92

Hukum yang akan diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu kepada KHUP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal-pasal 351 KHUP, (penganiayaan), pasal 352 KHUP (penganiayaan ringan), pasal 353 KHUP (penganiayaan yang di rencanakan), pasal 354 KHUP (penganiayaan berat), pasal 355 KHUP (penganiayaan berat yang di rencanakan) dan pasal 356 (penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu (yang sah), Meskipun ketentuan diatas tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi sedikitnya dapat digunakan untuk mengadukan pelaku ke polisi. Bahkan KHUP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau anaknya, seperti yang di atur dalam pasal 356 ayat (1) yang berbunyi:

“pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, atau 355 dapat di tambah sepertiganya : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya”.¹²

Jika pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya pasal ini bersifat netral gender (genderless) dan mengandung prinsip keadilan gender. Namun seringkali dalam praktek, para penegak Hukum seringkali tidak responsive terhadap

kepentingan perempuan atau melihat masalah ini secara umum. Hal ini disebabkan karena :

- a. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat
 - b. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak dilantar, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara tapi hanya menjatuhkan hukuman percobaan.
 - c. Mayoritas isteri sangat tergantung baik secara ekonomi dan secara emosional masih cinta kepada suaminya.
1. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan peraturan sighth taklit talak sesungguhnya juga memberikan perlindungan Hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya (pasal 24) Kemudian dalam 19 huruf d peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 juga merupakan instrument hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. dalam pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri, berdasarkan pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.¹³
 2. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU No.23 tahun 2004)

¹²Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2011, Hal. 39

¹³Marpaung, Ledeng, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 102

Undang-undang yang baru saja diperlakukan yaitu sejak 22 september 2004 ini merupakan satu bentuk pembaharuan Hukum di Indonesia, yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Undang-undang lahir ini mengingat banyaknya kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsure tindak pidana dalam KHUP yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Begitu luasnya perumusan perbuatan yang masuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga KHUP dirasakan tidak cukup memadai untuk menampungnya. Terdapat sejumlah tindak kekerasan fisik dan psikis lainnya yang tidak di beri sanksi pidana. Akibatnya, seperti yang di kemukakan oleh Fathul Djannah, walaupun terjadi viktimisasi perempuan, tidak dapat di lakukan tindakan Hukum.

Usaha untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam KHUP di lakukan dengan mengundang UU PKDRT pada tanggal 22 september 2004. Dengan lahirnya UU PKDRT menandai sebuah babak baru dalam perjuangan panjang kelompok perempuan untuk adanya perlindungan hukum dari praktik kekerasan yang selama ini dianggap ada karena peristiwanya terjadi di lingkup pribadi dan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat.

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, menghambat, mengang, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual, baik yang terjadi di area public maupun domestic.
2. Perlindungan Hukum isteri korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun demikian kasus KDRT masih terus menjadi.
3. Putusan hakim terdapat kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari perundang-undangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah/ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun sayang sekali belum mengintegrasikan perspektif dan korban oleh majelis sehingga putusan yang di hasilkan masih sangat normative dan cenderung mengabaikan keadilan korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap Undang-undang terhadap masyarakat harus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat belum tahu UU PKDRT.
2. Disarankan dalam kasus seperti ini seharusnya tidak dijatuhi hukuman karena yang mesti dan lebih baik dilakukan adalah didamaikan (mediasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiati Soeroso, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Surabaya: Sinar Grafika, 2010.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Pers Indonesia. 2011
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Semarang : Citra Aditya Bakti. 2009.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rajawali Pers. 2011.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003.